

ANALISIS PENINGKATAN HUBUNGAN MESIR – ISRAEL PADA PERIODE PERTAMA MASA PEMERINTAHAN ABDEL FATTAH AL-SISI TAHUN 2014-2018

Muhammad Khoirul Huda

Universitas Indonesia
hudha.03@gmail.com

Abstract

After experiencing the ups and downs, the relationship between Egypt and Israel significantly increased under the leadership of President Abdel Fattah al-Sisi who was sworn in on June 8, 2014. The main priority in this era is to tackle terrorism and improve regional safety and security, and rely on Israel as a strategic partner. This cooperation is mutually beneficial for both parties, Egypt is increasing its position in relations with the US and European Union, while Israel guarantees the continuation of Egypt's favorable foreign policy. The restoration of Egyptian-Israeli relations is also part of a consolidation of the anti-Iran bloc which includes Israel, Saudi Arabia and Egypt.

Keywords: *al-Sisi; Egypt; Foreign Relations; Israel*

Abstrak

Setelah sebelumnya mengalami pasang surut, hubungan antara Mesir dan Israel kembali meningkat secara signifikan dibawah kepemimpinan

Presiden Abdel Fattah al-Sisi yang dilantik pada 8 Juni 2014. Prioritas utama di masa as Sisi ini adalah untuk menanggulangi terorisme dan meningkatkan keselamatan dan keamanan kawasan, serta mengandalkan Israel sebagai mitra strategis. Kerja sama ini saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, Mesir meningkatkan posisinya dalam hubungan dengan AS dan Uni Eropa, sementara Israel menjamin kelanjutan kebijakan luar negeri Mesir yang menguntungkan. Pemulihan hubungan Mesir-Israel juga merupakan bagian dari konsolidasi blok anti-Iran yang mencakup Israel, Arab Saudi dan Mesir.

Kata Kunci: *al-Sisi; Hubungan luar negeri; Israel; Mesir*

Pendahuluan

Hubungan bilateral antara Mesir dan Israel sering mengalami pasang surut, meskipun Mesir telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel di Camp David pada tahun 1979. Setelah penggulingan Hosni Mubarak pada tahun 2011, hubungan kedua negara ini hampir putus. Jajak pendapat publik pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 54% rakyat Mesir mendukung membatalkan perjanjian damai dengan Israel (Mozgovaya 2011). Partai Kebebasan dan Keadilan atau *The Freedom and Justice Party* (FJP) yang diisi oleh kelompok Ikhwanul Muslimin- partai yang berkuasa sejak 2012, yang dekat dengan ideologis Hamas Palestina - mengumumkan revisi perjanjian Camp David (Fam 2011). Menanggapi operasi Israel di Jalur Gaza pada November 2012, Presiden Mesir, Mohamed Morsi, merespon secara cepat dengan serangkaian gerakan diplomatik, diantaranya menarik duta besarnya dari Tel Aviv (Sherwood 2012). Bagi Israel, penggulingan Mubarak dan penguatan partai-partai keagamaan berarti destabilisasi salah

satu dari dua pilar regionalnya (yang lain adalah Yordania) dari keamanan Israel.

Sejak penggulingan militer terhadap Morsi pada tahun 2013 oleh Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, hubungan Mesir dengan Israel membaik dan meningkat secara signifikan. Dalam pidato yang sedikit dilaporkan di Forum Ekonomi Davos pada Januari 2015, Presiden Sisi menjunjung hubungan Mesir dengan Israel sebagai model untuk perdamaian antara Israel dan Palestina (Sievers 2009). Hubungan yang semakin membaik ini terbukti dengan dibukanya kembali kedutaan Israel di Kairo pada 2015 lalu, dan pada tahun yang sama, Mesir memilih Israel untuk menjadi anggota komite Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini merupakan yang pertama kalinya Mesir memilih Israel di PBB sejak dibentuknya negara Yahudi pada tahun 1948. Contoh semacam ini hanyalah beberapa dari banyak perkembangan yang menandakan sebuah babak baru dalam hubungan kedua negara tersebut (Tahhan 2017).

Pada 2016, untuk pertama kalinya dalam satu dekade, seorang menteri luar negeri Mesir, Sameh Shoukry, melakukan kunjungan resmi ke Israel. Di rumah Perdana Menteri Netanyahu di Yerusalem, mereka menyaksikan pertandingan final Kejuaraan Sepak Bola Eropa bersama-sama. Meskipun kerjasama keamanan, hubungan mulai berubah dalam aspek lain juga: pada tahun 2016, Mesir menawarkan helikopter untuk membantu memadamkan kebakaran di dekat Haifa. Kembalinya kedua duta ke negara tuan rumah mereka pada tahun 2016 dan 2017 mungkin dilihat sebagai tanda lain untuk meningkatkan hubungan politik. Israel berharap untuk hubungan lebih lanjut dalam kunjungan kenegaraan, misalnya, seperti kunjungan Presiden Sisi ke Israel atau undangan

kepada Perdana Menteri Netanyahu ke Mesir. Sejauh ini, satu-satunya pertemuan resmi dari kedua pemimpin itu terjadi di New York selama Majelis Umum PBB pada bulan September 2017 (Awadalla 2017).

Dalam bidang kerjasama keamanan. Prioritas kedua belah pihak adalah mengakhiri pemberontakan jihadis di Sinai, yang berlangsung sejak 2011. Dalam memerangi pemberontakan Mesir dihalangi oleh ketentuan perjanjian damai Israel-Mesir, yang membelah Sinai menjadi zona berbagai demiliterisasi. Pertempuran terberat terjadi di zona di manasecara resmi hanya empat batalyon pasukan dan pasukan polisi Mesir yang dapat ditempatkan. Situasi di semenanjung telah memburuk sejak 2014, ketika beberapa kelompok teroris bergabung dengan apa yang disebut Negara Islam (ISIS) (Schenker 2015). Selain serangan terhadap pasukan keamanan Mesir dan turis, kelompok-kelompok ini juga menyerang sasaran di Israel. Pihak berwenang Israel secara tidak resmi telah menyetujui peningkatan jumlah tentara Mesir yang beroperasi di Sinai (saat ini sekitar 25.000) dan untuk penggunaan peralatan berat termasuk tank dan artileri, dan serangan udara. Terlepas dari kerja sama intelijen, Israel berpartisipasi dalam pertempuran, misalnya, melalui drone. Stabilisasi Sinai juga terkait dengan konstruksi penghalang Israel di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Selain menghentikan serangan lebih lanjut oleh ekstremis, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi migrasi dan penyelundupan dari Afrika ke Israel. Dari perspektif Israel, kerja sama dengan Mesir juga diperlukan untuk menjaga efektivitas blokade Jalur Gaza (Bar'el 2018).

Setelah menganalisa tentang peningkatan hubungan Mesir-Israel, tulisan ini berupaya menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi meningkatnya hubungan antara Mesir dengan Israel dibawah pemerintahan Abdel Fattah As-Sisi.

Unit Analisa Model Strategik/Model Rasional (*Strategic/Rational Model*)

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu, yang harus dilakukan adalah dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada untuk menentukan mana alternatif yang paling baik dan yang paling buruk untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri (Bob Switky, Raymond Duncan, Barbara Jancar-Webster 2009).

Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatarbelakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Coplin mengatakan bahwa setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama adalah politik dalam negerikebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi

tertentu di mana negara itu menemukan jati dirinya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem. Konteks internasional menurut Coplin ialah posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain (Coplin 1980). Sedangkan kondisi ekonomi dan militer serta politik dalam negeri, merupakan determinan yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dalam menetapkan politik luar negeri.

Tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara menurut Willian D. Coplin:

1. Konteks internasional

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.

2. Kondisi politik dalam negeri

Bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walau-pun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan kepribadian pengambil keputusan atau struktur konsep internasional.

3. Kondisi ekonomi dan militer

Maksudnya adalah suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlu-

kan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan (Coplin 1980).

Dengan mengacu pada penjelasan teori diatasdapat dilihat bahwa determinan konteks internasional, politik dalam negeri, serta kondisi ekonomi dan militer berpengaruh terhadap perilakupengambil keputusan dalam menentukan tindakan politik luar negeri negara yang dipimpinnya.

Konteks Internasional: Stabilitas dan keamanan kawasan

Pasca Sisi memenangkan pemilu presiden dan dilantik Pada 8 Juni 2014, tantangan pertamanya adalah serangkaian serangan teroris terhadap militer di semenanjung Sinai (Darwisheh 2015). Kemitraan keamanan Mesir dengan Israel segera ikut bermain. Pemerintah Sisi berkoordinasi dengan Israel yang memberi lampu hijau kepada pasukan Mesir untuk ditempatkan di Zona B dan C Utara di Sinai untuk memerangi kelompok bersenjata Takfiri dengan senjata berat, kendaraan lapis baja, dan serangan udara.

Tindakan-tindakan ini langsung bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam lampiran keamanan Perjanjian Camp David, dan mereka menunjukkan fleksibilitas dan koordinasi antara Mesir dan Israel di awal masa-masa Sisi. Menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di Sinai tetap menjadi salah satu isu keamanan paling penting yang dimiliki oleh kedua negara. Israel sendiri telah melakukan sejumlah misi intelijen udara untuk mengungkap tempat-tempat persembunyian para teroris. Namun, dalam upaya untuk menghindari kontroversi, Kairo belum mengumumkan sifat kemitraan militer-keamanannya dengan Tel Aviv (Sulayman 2015).

Sisi juga telah lama tertarik secara pribadi melibatkan dirinya dengan proses perdamaian. Dalam pidato kepresidenannya yang pertama pada tahun 2014, Sisi menyatakan: “Kami akan bekerja untuk mencapai kemerdekaan Palestina dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.” Dengan ini, Sisi tampaknya mempertaruhkan posisinya pada isu yang diperdebatkan di Yerusalem Timur, baik dari pencaplokan Israel atas wilayah Yerusalem Timur dan klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Winter 2015). Sementara dukungan Sisi untuk Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina menyebabkan beberapa masalah diplomatik dengan Israel, desakannya pada solusi dua negara juga melemahkan posisi para pendukungnya yang berusaha untuk membangun kekuatan melawan kelompok-kelompok Islamis, Nasserists, Sayap Kiri, dan Partai Nour Salafi - semuanya menyatakan pendapat dengan menolak untuk mengakui Negara Israel dan mengklaim semua tanah Palestina sebagai satu-satunya Arab.

Dengan munculnya Sisi sebagai pemimpin yang kuat, tidak ada faksi politik pendukungnya yang mampu menekannya untuk mengubah retorikanya yang relatif positif tentang Israel. Sisi sebaliknya telah berprinsip bahwa hubungan Mesir-Israel adalah suatu keharusan mengingat musuh regional mereka adalah Hamas, dilihat sebagai perpanjangan Ikhwanul Muslimin Mesir. Dengan demikian, Sisi telah menggeser peran Mesir dengan Israel dari “perjuangan eksistensial” menjadi kemitraan yang saling membutuhkan (Soliman 2016).

Selama “Operation Projective Edge” Israel di Gaza, Sisi memperoleh kesempatan untuk mengadopsi citra mediator perdamaian- di komunitas internasional. Sisi mendapat manfaat dari penolakan

Israel terhadap mediasi internasional untuk gencatan senjata, yang menyebabkan Israel menyerukan Kairo untuk mengadakan perundingan dengan faksi Palestina dan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Citra Sisi sebagai pembawa damai membantu dalam beberapa bagian mengalihkan perhatian komunitas internasional dari tantangan pemerintah sendiri dengan kerusuhan domestik .¹

Pergerakan Sisi menuju pemulihan hubungan publik dengan Israel sebagian dimotivasi oleh pengalaman-pengalaman dengan krisis domestik besar-besaran. Isu-isu dari stagnasi ekonomi yang berpotensi mengurangi peran Mesir di perairan Nil telah mendorong Sisi untuk menegaskan kembali peran kepemimpinan regionalnya. Dia telah menemukan pembukaan dengan menghadirkan dirinya sebagai negosiator dalam salah satu isu internasional yang paling sensitif: negosiasi damai Israel-Palestina. Posisi ini memperkuat citra domestiknya sebagai pemimpin yang kuat.²

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menanggapi dengan baik peran pergeseran Mesir sebagai negosiator dalam proses perdamaian yang lebih besar, karena ini merupakan alternatif dari Inisiatif Perancis. Selain itu, keterlibatan Mesir lebih lanjut dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Israel karena kurangnya langkah serius untuk bernegosiasi dengan Palestina. Memang, inisiatif Sisi tidak membebani Netanyahu apa pun selain lebih banyak negosiasi. Mesir tidak memiliki kondisi yang jelas untuk negosiasi seperti membatasi perluasan pemukiman di Tepi Barat.

¹ Martin Beck, " Hamas, Israel and the July Gaza War 2014: War as the Result of a Policy of Consecutive Provocations," *Syddansk University - Centre for Mellemostudier*, no. July (2014). Hlm. 3.

² Winter, "El-Sisi's First Year as President: Legitimacy, Democracy, and Relations with Israel." hlm. 12.

Hubungan juga telah diperkuat melalui perkembangan diplomatik. Duta Besar Mesir, Hazem Khairat, berpartisipasi dalam Konferensi Herzliya keenam belas di Israel, berjudul: "Berbagi Harapan Israel: Visi atau Mimpi?" Khairat mewakili partisipasi resmi pertama Mesir dalam konferensi yang berpusat pada kebijakan keamanan dan pertahanan Israel. Selama konferensi, duta besar Mesir menyatakan bahwa Israel dan Palestina harus berkomitmen untuk mencapai perdamaian dan solusi dua-negara adalah satu-satunya solusi, dan menekankan bahwa mengabaikan kebenaran ini dapat menyebabkan peperangan yang berkelanjutan.³

Kunjungan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry ke Israel merupakan kunjungan monumental sebagai yang pertama sejak tahun 2007. Pertemuannya dengan Netanyahu di kantor pusat Perdana Menteri Israel di Yerusalem dan juga Tel Aviv sangat simbolis karena ia mengundurkan diri dari tabu diplomatik tradisional Yerusalem di mana semua presiden Mesir telah berdiam sejak Mubarak dan presiden transisi Adly Mansour.

Setelah bertahun-tahun hubungan Mesir-Israel terbatas pada koordinasi keamanan dan intelijen, diplomasi Mesir kini bercita-cita menjadi peran penting dalam hubungan tersebut. Foto Shoukry di samping patung Theodore Herzl –yang dianggap sebagai salah satu 'ayah Zionisme' tampaknya mengirimkan pesan bahwa ia telah mendamaikan kontradiksi antara Zionisme Herzl dan Arab, dan keakraban yang digambarkan oleh Shoukry dan Netanyahu tentang kejuaraan Eropa mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah

³ Jeremy Ruden, "Amb. Hazem Khairat, Egypt Ambassador to Israel, at 2016 Herzliya Conference: "There Is Not Much Time Left to Achieve Peace – The Absence of Hope Undermines under the Regional Stability "," *Lauder School of Government of IDC Herzliya*, last modified 2016, accessed June 14, 2018, <http://www.herzliyaconference.org/eng/?CategoryID=556&ArticleID=2746>.

Mesir atas reaksi lokal terhadap pertumbuhan hubungan Mesir-Israel. Sejalan dengan itu, Netanyahu juga menggambarkan kunjungan itu sebagai pencapaian politik pribadi, di mana ia telah memperkuat hubungan Israel dengan musuh historis terbesarnya. Kunjungan tersebut menunjukkan kecenderungan di mana Israel dapat mengalihkan hubungannya dengan negara-negara Arab dari balik pintu tertutup ke ruang publik.⁴

Meskipun Sisi selalu menunjukkan minat dalam hubungan Mesir-Israel, beberapa pergeseran regional telah meningkatkan urgensi pendekatan hubungan diplomatik ini. Waktu kunjungan Shoukry ke Yerusalem berhubungan dengan kesepakatan untuk menormalkan hubungan Turki-Israel, yang telah memburuk setelah penyerbuan armada “Mavi Marmara” Turki pada tahun 2010 yang berusaha menghancurkan blokade Gaza.⁵ Akhirnya Turki dan Israel pada tahun 2016 telah mencapai kesepakatan di mana bantuan dapat dikirim ke Gaza dan Yayasan Perumahan Turki dapat menyelesaikan proyek-proyeknya di sana. Dengan rekonsiliasi Turki-Israel yang mengancam peran Mesir sebagai pembawa perdamaian, negara itu sekarang mengerahkan upaya besar untuk mendapatkan konfirmasi dari Israel bahwa negara itu dapat terus memainkan peran penting dalam masalah Palestina, khususnya berkaitan dengan Jalur Gaza yang berbatasan dengan Sinai.

⁴ Raphael Ahren and Tamar Pileggi, “On Rare Israel Visit, Egypt FM Pushes for Renewed Peace Talks,” *The Times of Israel*, last modified 2016, accessed June 14, 2018, <https://www.timesofisrael.com/on-rare-israel-visit-egypt-fm-pushes-for-renewed-peace-talks/>.

⁵ Anadolu Agency, “Turkey-Israel Relations: A Timeline,” *Anadolu Agency*, last modified 2016, accessed June 14, 2018, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-israel-relations-a-timeline/598666>.

Kunjungan Netanyahu ke negara-negara Lembah Sungai Nil juga memicu kemarahan di Mesir sebagai konsekuensi dari peran Mesir yang menurun - dan peran Israel yang naik di Afrika. Dengan cara ini, kehadiran Shoukry di Yerusalem bertindak sebagai cara untuk meyakinkan publik Mesir bahwa kehadiran Israel di Lembah Sungai Nil adalah sekutu dan bukan musuh. Serupa dengan itu, kunjungan itu meningkatkan harapan Kairo akan Israel yang berfungsi sebagai mediator di antara mereka dan sebagai persiapan Ethiopia untuk meluncurkan proyek Bendungan Grand Renaissance, yang ditakutkan akan menghentikan akses negara Mesir hingga 11-19 miliar meter persegi air tawar.

Pada dasarnya, Kairo percaya bahwa hubungan dengan Israel secara strategis dan diplomatis menguntungkan bagi pemerintah Sisi dan posisi regional negara tersebut. Kecenderungan ini menuju pemulihan hubungan yang lebih besar dan kemungkinan akan berlanjut. Hal itu terbukti dengan keharmonisan hubungan Mesir dan Israel yang semakin mencuat ke publik setelah Al Sisi dan Netanyahu bertemu untuk pertama kalinya secara terang-terangan di New York pada 18 September 2017 lalu. Pertemuan itu dilakukan Sisi guna berusaha mengembalikan dialog proses perdamaian Timur Tengah khususnya terkait Israel-Palestina. Tidak hanya dengan Israel, Sisi juga melakukan pertemuan terpisah dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk terus bekerjasama dalam mengusahakan solusi dua negara. Namun hingga saat ini perbatasan untuk solusi tersebut masih dalam tahap negosiasi dan sengketa.⁶

⁶Awadalla, "Egypt's Sisi, Israel's Netanyahu Meet for First Time in Public."

Kondisi Ekonomi dan Politik

Presiden Sisi mewarisi ekonomi dalam kondisi yang lebih buruk dari pada periode akhir Mubarak. Baik Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), yang memerintah negara itu dari kejatuhan Mubarak sampai akhir Juni 2012, maupun Presiden Mohammed Morsi yang memerintah dalam 12 bulan berikutnya, memperkenalkan langkah-langkah yang mengubah karakter ekonomi. Tetapi situasi ekonomi secara keseluruhan memburuk karena ketidakstabilan yang berkepanjangan mengeringkan investasi asing dan domestik dan mengurangi arus wisatawan dan mata uang asing yang mereka bawa ke negara itu menjadi semakin kecil, memperlambat laju pertumbuhan PDB.

Secara struktural, Mesir tetap menjadi negara dengan sektor negara yang penting tetapi kemudian menyusut, sektor swasta dengan ikatan yang kuat dengan pembentukan politik, dan ekonomi militer yang signifikan dengan hubungan yang berkembang dengan pengusaha domestik dan asing. Ekonomi juga dibebani oleh kebijakan mensubsidi energi dan makanan pokok sebagai bentuk kesejahteraan. Pada 2013, subsidi yang diperkenalkan oleh Nasser mengkonsumsi 26 persen dari total belanja publik, atau 11-12 persen dari PDB. Menurut perkiraan IMF, subsidi energi menyumbang sebagian besar pengeluaran seperti listrik, gas, dan bensin. Tingginya tingkat kemiskinan absolut serta ketimpangan pendapatan yang meningkat menciptakan ketidakpuasan yang diwujudkan dalam sejumlah besar pemogokan dan protes yang pemerintah tidak dapat mengendalikan baik sebelum pemberontakan atau selama tahun-tahun penuh gejolak SCAF dan Morsi, dan bahkan setelah kudeta 2013.

Volume perdagangan antara Mesir dan Israel adalah sekitar \$ 136 juta, hampir lima kali lebih kecil daripada antara Mesir dan Yordania. Bidang kerjasama ekonomi yang paling penting adalah energi. Untuk waktu yang lama, Mesir telah menjadi sumber penting pasokan energi untuk Israel (terhitung 40% dari impor gas Israel). Pada tahun 2012, Mesir memutuskan perjanjian ekspor gas yang sangat tidak populer di negara itu sebagai akibat dari serangan berulang pada pipa gas Sinai. Sebagai tanggapan, Israel menggugat Mesir dalam proses arbitrase sebelum Kamar Dagang Internasional, yang pada 2015 memerintahkan Mesir untuk membayar lebih dari \$ 2 miliar dalam bentuk penalti kepada perusahaan Israel karena pelanggaran kontrak. Karena penurunan produksi gas alamnya sendiri dan meningkatnya permintaan energi, Mesir sejak 2014 telah berubah dari eksportir menjadi importir.⁷

Saat ini, perusahaan Israel sedang mengejar pembicaraan lanjutan tentang ekspor gas alam dari Mediterania (misalnya, dari ladang gas Tamar, di mana ekstraksi direncanakan untuk 2019) ke Mesir. Tindakan ini mendapat dorongan dari undang-undang baru yang disetujui oleh parlemen Mesir yang memungkinkan perusahaan swasta untuk mengimpor dan menjual gas alam di Mesir. Israel sangat bergantung pada akses ke terminal LNG Mesir yang akan memungkinkan ekspor ulang gas LNG lebih lanjut. Namun, Kementerian Energi Mesir telah mengumumkan bahwa tidak ada lisensi yang akan dikeluarkan untuk perusahaan yang mengimpor gas Israel tanpa resolusi proses arbitrase yang sedang berlangsung. Menurut pembicaraan sebelumnya, sebagai imbalan

⁷ Patrycja Sasnal and Michał Wojnarowicz, "Improvement in Israeli-Egyptian Relations," *PISM The Polish Institute of International Affairs* (2017). hlm. 2.

atas pengakuan Israel ke pasar Mesir, hukuman itu diperkirakan akan dikurangi. Yang terkait erat dengan masalah ini adalah demarkasi yang direncanakan dari perbatasan maritim antara Israel dan Mesir. Posisi Mesir dapat diperkuat setelah ekstraksi gas dari ladang gas Zuhr dimulai.

Kesimpulan

Peningkatan hubungan Israel-Mesir berdampak pada konflik Israel-Palestina. Berkat kedudukan yang lebih baik dengan Israel, Mesir mampu menengahi pembicaraan antara Fatah dan Hamas tanpa takut akan reaksi Israel yang akut. Memainkan peran mediator memberi pengaruh lebih besar kepada Mesir pada Hamas yang didukung Israel. Pada tahun lalu, Mesir telah mengisyaratkan sikap yang lebih damai terhadap tuntutan Israel dalam konflik: Mesir tidak lagi bersikeras bahwa semua Yerusalem harus menjadi ibu kota negara Palestina.

Meningkatkan hubungan Mesir-Israel adalah bagian dari reorientasi aliansi yang lebih luas di Timur Tengah dan terkait dengan konvergensi kepentingan regional mereka dengan orang-orang Arab Saudi dan Yordania. Aliansi informal mereka telah muncul untuk membatasi pengaruh Iran dan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah dan untuk mempertahankan status quo. Tanda lain dari kerjasama regional mereka yang lebih luas dapat dilihat dalam kurangnya penentangan Israel terhadap pengesahan ke Arab Saudi dari dua pulau Mesir, Tirana dan Sanafir - penting untuk kebebasan navigasi di Laut Merah.

Suatu faktor yang kondusif untuk lebih meningkatkan hubungan Mesir-Israel adalah kebijakan AS di Timur Tengah.

Dukungan Amerika untuk menggulingkan Mubarak adalah salah satu alasan utama kritik Israel terhadap pemerintahan Barack Obama. Sekarang, meskipun ada hubungan baik antara administrasi Trump dan Mesir dan Israel, AS belum memenuhi harapan kedua negara: AS belum menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran, juga tidak mengakui Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Kebijakan luar negeri AS masih mendorong Israel dan Mesir (dan Arab Saudi) untuk bekerja sama lebih dekat.

Dari sudut pandang kepentingan Uni Eropa, kerja sama Israel-Mesir di satu sisi mengurangi ketegangan lokal, tetapi di sisi lain, memperkuat aliansi anti-Iran antara Israel dan negara-negara Arab, yang dapat mengakibatkan meningkatnya ketidakstabilan regional. Selain itu, hubungan Mesir-Israel yang lebih baik dapat memperkuat hubungan Mesir dengan Uni Eropa dan AS secara de facto melegitimasi tindakan non-demokratis dari otoritasnya dalam urusan internal, seperti menindas oposisi. Sebuah rintangan bagi kerja sama Israel-Mesir masih merupakan sikap yang tidak menguntungkan dari opini publik Mesir terhadap Israel. Di tingkat sosial, hubungan Mesir dengan Israel akan meningkat hanya ketika pihak berwenang Mesir, yang mendukung kebijakan semacam itu, memiliki dukungan publik yang luas.

Daftar Pustaka

- Agency, Anadolu. "Turkey-Israel Relations: A Timeline." *Anadolu Agency*. Last modified 2016. Accessed June 14, 2018. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-israel-relations-a-timeline/598666>.
- Awadalla, Nadine. "Egypt's Sisi, Israel's Netanyahu Meet for First Time in Public." *Reuters*. Last modified 2017. Accessed

- March 8, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-un-assembly-egypt-israel/egypts-sisi-israels-netanyahu-meet-for-first-time-in-public-idUSKCN1BU1BW?il=0>.
- Bar'el, Zvi. "Gaza Cease-Fire: Egypt's the Big Winner, and It Will Come at a Price for Israel." *Haaretz*. Last modified 2018. Accessed June 15, 2018. <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-gaza-cease-fire-egypt-s-the-big-winner-and-it-will-cost-israel-1.6134903>.
- Beck, Martin. " Hamas, Israel and the July Gaza War 2014: War as the Result of a Policy of Consecutive Provocations." *Syddansk University - Centre for Mellemostudier*, no. July (2014).
- Coplin, William D. *Introduction to International Politics*. Prentice-Hall, 1980.
- Darwisheh, Housam. "Regime Survival Strategies and the Conduct of Foreign Policy in Egypt Movements." *IDE ME Review* 2 (2015).
- Fam, Mariam. "Muslim Brotherhood Calls for Review of Camp David Accord." *Bloomberg*. Last modified 2011. Accessed June 15, 2018. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-05-05/muslim-brotherhood-calls-for-review-of-camp-david-accord-2->.
- Mozgovaya, Natasha. "As the Mideast Burns, Who Cares About Israel and the Palestinians?" *Haaretz*. Last modified 2011. Accessed June 15, 2018. <https://www.haaretz.com/1.5004183>.
- Pileggi, Raphael Ahren and Tamar. "On Rare Israel Visit, Egypt FM Pushes for Renewed Peace Talks." *The Times of Israel*. Last modified 2016. Accessed June 14, 2018. <https://www.timesofisrael.com/on-rare-israel-visit-egypt-fm-pushes-for-renewed-peace-talks/>.

- Ruden, Jeremy. "Amb. Hazem Khairat, Egypt Ambassador to Israel, at 2016 Herzliya Conference: "There Is Not Much Time Left to Achieve Peace – The Absence of Hope Undermines under the Regional Stability "." *Lauder School of Government of IDC Herzliya*. Last modified 2016. Accessed June 14, 2018. <http://www.herzliyaconference.org/eng/?CategoryID=556&ArticleID=2746>.
- Sasnal, Patrycja, and Michał Wojnarowicz. "Improvement in Israeli-Egyptian Relations." *PISM The Polish Institute of International Affairs* (2017).
- Schenker, David. "Security Challenges in Egypt Two Years After Morsi." *The Washington Institute for Near East Policy* (2015).
- Sherwood, Harriet. " Hamas Says 'gates of Hell Opened' as Israel Kills Military Leader in Gaza." *The Guardian*. Last modified 2012. Accessed June 15, 2018. <https://www.theguardian.com/world/2012/nov/14/israel-assassinates-amas-military-chief>.
- Sievers, Marc J. "Riding the Egyptian-Israeli Roller Coaster 2011–2015." *The Washington Institute for Near East Policy* (2009).
- Soliman, Mohamed. "Sisi's New Approach to Egypt-Israel Relations." *Washington Institute*. Last modified 2016. Accessed June 14, 2018. <http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/isis-new-approach-to-egypt-israel-relations>.
- Tahhan, Zena. "Egypt-Israel Relations 'at Highest Level' in History." *Al Jazeera*. Last modified 2017. Accessed June 15, 2018. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/egypt-israel-relations-highest-level-history-161107083926863.html>.

W. Raymond Duncan, Barbara Jancar-Webster, Bob Switky. *World Politics In The 21st Century*. Boston: Cengage Learnin, 2009.

Winter, Ofir. "El-Sisi's First Year as President: Legitimacy, Democracy, and Relations with Israel." *Strategic Assessment* (2015).

„ سليمان , محمد . ”توجه السيسي الجديد نحو العلاقات المصرية الإسرائيلية. *Washington Institute*. Last modified 2016. Accessed June 14, 2018. <http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/isis-new-approach-to-egypt-israel-relations>.